

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap *Social Capital* Desa

Elga Agripta Aribowo^{a,*}, Andy Dwi Bayu Bawono^b

^{ab}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

*elgachandra@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze village financial management and its impact on *social capital*. This research uses exploratory qualitative research methods. This research was conducted in Tanjung Village, Bendo District, Magetan Regency. Data collection techniques in this study using interviews, observation, library techniques and documentation techniques. The data analysis technique used was data adduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the analysis show that (1) Tanjung Village Government apparatus in general are familiar with financial management and financial management principles, but the two village chief do not fully understand financial management. (2) There are indications that Social Capital in Tanjung Village still exists, but has decreased significantly after the enactment of Law Number 6 of 2014. (3) The reduced community participation in gotong royong is an obstacle and challenge faced by the Tanjung Village Government as for solutions offered by deliberation. (4) Based on the results of the analysis of the financial statements of the 2020 APBDes realization in Tanjung Village, it can be seen that the largest proportion of income is obtained from transfer income. (5) Based on the proportion of expenditure the largest use is used for goods and services expenditure. In addition, in the proportion of Sector Expenditures, the largest use is used for Expenditures for the Administration of Village Government. (6) Based on the calculation of the independence ratio, Tanjung Village can be said to have a low level of independence.

Keywords: Financial Management Analysis, Social Capital, Village Finance, Indepence Ratio

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap *social capital*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dalam peneliian ini menggunakan metode wawancara, observasi, teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aparatur Pemerintah Desa Tanjung secara umum sudah paham dengan pengelolaan keuangan maupun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tetapi dua kepala dusun belum sepenuhnya paham dengan pengelolaan keuangan. (2) *Social Capital* (Modal Sosial) di Desa Tanjung hingga saat ini terindikasi masih terdapat akan tetapi penurunan yang signifikan pasca turunnya UU Nomor 6 Tahun 2014. (3) Berkurangnya keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Tanjung adapun solusi yang ditawarkan dengan bermusyawarah (4) Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan realisasi APBDes Tahun 2020 Desa Tanjung dapat diketahui bahwa proporsi Pendapatan terbesar yaitu diperoleh dari Pendapatan Transfer. (5) Berdasarkan proporsi Belanja penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa. Selain itu dalam proporsi Belanja Bidang penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (6) Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian, Desa Tanjung dapat dikatakan tingkat kemandiriannya masih rendah.

Kata Kunci : Analisis Pengelolaan Keuangan; Social Capital; Keuangan Desa; Rasio Kemandirian

1. Pendahuluan

Tata kelola keuangan desa adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Hal tersebut didukung dengan adanya desentralisasi fiskal ke desa. Desentralisasi Fiskal ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam mengelola

anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil. UU Desa juga menjamin bahwa setiap desa akan menerima dana desa dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Kuangan Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APBDesa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Terdapat tiga komponen utama dalam APBDesa yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pemerintah Indonesia menggelontorkan anggaran dana desa sejumlah 72 triliun pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sejumlah dua triliun dari tahun 2019. Anggaran tersebut tentunya disalurkan untuk semua desa dan anggaran tersebut di fokuskan untuk pengembangan ekonomi desa.

Dalam memajukan perekonomian serta pembangunan suatu desa juga didukung oleh pentingnya peranan *social capital* yang ada di dalam masyarakat yang membuat masyarakat desa bersedia ikut andil serta berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. *Social Capital* yang dimaksud adalah perasaan guyub atau saling membantu seperti kegiatan bergotong royong membangun fasilitas publik, munjung/berkunjung yang dilakukan masyarakat desa. Modal sosial juga merupakan cerminan dari kearifan lokal masyarakat desa (Mirayani, 2014).

Saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang mengulas mengenai analisis pengelolaan keuangan desa dan dampak lain terhadap *social capital* desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang mana penelitian ini mengarah kepada *social capital* desa khususnya bagaimana menyikapi kondisi kegotorongan masyarakat desa sekarang dan dihubungkan dengan konsep pengelolaan keuangan desa sekarang dimana pemerintah desa mendapat anggaran dana yang besar dari pemerintah pusat.

2. Kajian Literature

2.1 Teori *Social Capital*

Teori mengenai *Social Capital* atau modal sosial pertama kali di pekembangkan oleh Bourdieu tahun 1972 kemudian disusul dengan Coleman tahun 1988 (Hauberer,2011). Modal sosial menurut Bourdieu (1980) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan suatu aset sosial seperti norma,kepercayaan, serta jaringan sosial sehingga membuat aktivitas

lebih terkordinasi sehingga baik aktivitas individu, kelompok dan masyarakat menjadi lebih efisien dan produktif.

Hasbullah menjelaskan bahwa letak dari inti modal sosial yakni pada kemampuan masyarakat untuk bekerja di dalam suatu kelompok guna membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang tercipta oleh suatu pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan (*reciprocity*), dan dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. (Hasbullah:2006:5)

2.2 Financial Management (Manajemen Keuangan)

Menurut (Lisovskaya,2006, pada Khominich et al,2016) mendefinisikan manajemen keuangan adalah sistem prinsip dan metode yang sesuai dengan pembentukan, distribusi, dan penggunaan keuangan sumber daya dalam mengembangkan dan melaksanakan suatu keputusan manajerial serta untuk memastikan ukuran dan struktur aset yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Lebih lanjut (Kovalev,2014, pada Khominich et al,2016) juga menjelaskan definisi manajemen keuangan yaitu tindakan sistem untuk mengoptimalkan keseimbangan suatu entitas ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2009:37) Di dalam akuntansi sektor publik, kedudukan manajemen keuangan adalah memberikan informasi akuntansi secara relevan dan handal mengenai perencanaan dan pengendalian organisasi kepada manajer. Menurut Dewi Utari (2014:1), Manajemen keuangan yaitu suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang seminimal mungkin dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian eksploratif merupakan penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain sehingga peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan di teliti (Bungin,2013:28).

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012).

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Perangkat Desa (Tiap-tiap Kasi), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan Tokoh masyarakat. . Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik

wawancara, teknik kapustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua langkah yakni metode kualitatif dengan model analisis data di lapangan Model Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik analisis data yang kedua adalah menggunakan Analisis kinerja keuangan yaitu analisis rasio kemandirian.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara umum

Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan sejauh ini Perangkat Desa Tanjung secara umum sudah mengenal dan memahami tentang pengelolaan keuangan termasuk BPD dengan baik. Hal itu tercermin dengan pernyataan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung, sebagai berikut :

“Saya sebagai kepala desa pasti mengenal terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya pengelolaan keuangan Desa itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan juga penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan kemudian akan dituangkan pada periode. periodisasi adalah satu tahun anggaran.” (Wawancara 18 September 2021).

Pemahaman Tentang Sumber-Sumber Pendapatan

Secara keseluruhan Perangkat Desa Tanjung sudah mengenal terkait sejauh mana pemahaman mereka dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi , dan Pendapatan Asli Desa. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tanjung, sebagai berikut :

“Untuk Pendapatan Asli Desa itu bersumber dari hasil usaha desa itu sendiri dalam hal ini Desa Tanjung yang selama ini sudah berjalan adalah dari sumber pendapatannya dari retribusi pasar desa, yang kedua ada lelang aset desa. Pendapatan transfer kita ada dana desa yang mana dianggarkan bersumber dari APBN dan diperuntukkan untuk desa

dan ditransfer melalui APBD, dan kegunaan untuk pelaksanaan pembangunan pemerintahan juga pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD mekanismenya adalah penyaluran diserahkan kepada kabupaten ataupun kota masing-masing hal itu tertuang di dalam peraturan bupati khususnya untuk kita adalah Peraturan Bupati Magetan, selanjutnya untuk BHPR itu berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan Retribusi dari kabupaten ataupun kota.” (Wawancara 18 September 2021).

Pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan

Dalam hal pemahaman prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, secara umum pemerintah Desa Tanjung sudah paham terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pemerintah Desa Tanjung juga sudah menjalankan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan hasil wawancara dengan Seketaris Desa, sebagai berikut :

“Sampai sejauh ini paham dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan” (Wawancara 16 September 2021)

Dampak positif dari Pengelolaan Keuangan Desa yang sekarang

Saat ini dengan pengelolaan keuangan yang semakin modern dan transparan didukung dengan adanya aplikasi resmi dari pemerintah yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) memunculkan dampak positif. Pemerintah Desa Tanjung sudah menggunakan aplikasi tersebut. Dengan adanya Siskeudes mempermudah dan tentunya pelaporannya bisa tepat waktu karena bersifat online dan terhubung langsung ke pemerintah pusat. Hal tersebut juga diutarakan oleh Kaur keuangan, sebagai berikut :

“Menurut saya sangat positif sekali karena ini ada tambahan lagi aplikasi yang siskeudes desa itu sangat membantu sekali dengan keuangan desa kita. Serta banyak laporan-laporan yang langsung dihandle di siskeudes itu”. (Wawancara 15 September 2021)

Dampak negatif dari Pengelolaan Keuangan Desa yang sekarang

Adapun untuk sisi negatifnya tidak ada dari pengelolaan keuangan desa yang sekarang tetapi kekurangannya yakni dengan berkembangnya teknologi yang tidak diikuti SDMnya. Hal tersebut tercemin dari pernyataan Kaur Keuangan, sebagai berikut :

“Bagi yang belum paham ya kita semakin ribet.” (Wawancara 15 September 2021)

Pemahaman tentang isu Social Capital Desa

Social Capital Desa tergantung pada masyarakatnya. Beberapa masyarakat masih terdidik untuk ikut serta dalam bergotong-royong tetapi sebagian sudah tidak ikut terlibat. *Social Capital* di Desa Tanjung hingga saat ini masih terlaksana. Keterlibatan masyarakat Desa Tanjung di dalam pembangunan desanya masih tercipta dan bisa dirasakan. Hal itu bisa dilihat di dalam partisipasi masyarakatnya seperti ikut serta dalam musyawarah dusun, pembangunan infrastruktur bersama secara gotong-royong dan pemberdayaan masyarakat. Adanya Undang-Undang Desa saat ini, masyarakat dituntut mandiri dalam mengelola desanya. Banyak dana yang sudah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa diikuti dengan pengelolaan keuangan desa yang bagus diharapkan masyarakat desa semakin aktif ikut serta dalam memajukan desanya. Keaktifan masyarakat di Desa Tanjung masih cukup bagus. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Desa , sebagai berikut :

“Terkait dengan keaktifan masyarakat dari kegiatan yang ada di Desa Tanjung, kalau dibidang yang lainnya misalkan penetapan APBDes mereka juga ikut, walaupun ada yang ditanyakan mereka juga langsung berpartisipasi ditanyakan bahkan kalau ada kegiatan yang sifatnya dari desa mereka akan sukarela untuk ikut membantu juga.” (Wawancara 16 September 2021)

Perbedaan Social Capital masyarakat dahulu dan sekarang

Dalam hal keaktifan masyarakatnya seperti gotong-royong, membangun fasilitas umum bersama terdapat perbedaan antara dahulu dan sekarang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa, sebagai berikut :

“Kalau terkait dengan jiwa gotong-royong masyarakat kami masih berjalan mungkin ada kurangnya terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat”.(Wawancara 18 September 2021)

Keberadaan *Social Capital* Desa

Dengan banyaknya pendapatan Desa yang berasal dari dana transfer yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa memberikan sedikit perubahan terhadap kontribusi ataupun sumbangan warga dalam bentuk uang untuk pembangunan desa. Jika dahulu segala pembangunan desa dibantu oleh dana swadaya masyarakat maka saat ini sudah dianggarkan lewat APBD Desa Tanjung khususnya sehingga tidak ada lagi kontribusi uang untuk desa. Namun disisi lain, masyarakat Desa Tanjung masih memberikan kontribusi berupa natura seperti memberikan kontribusi tenaga untuk bergotong-royong dan kontribusi berupa makanan secara sukarela. Hal tersebut juga diutarakan oleh Kepala Desa Tanjung, sebagai berikut :

“Kalau dibilang kontribusi yang jelas masih ada dari masyarakat tapi untuk kontribusi berupa uang kelihatannya tidak. Karena masyarakat sudah semakin kritis dan tahu bahwa uang Desa itu banyak tetapi kalau tenaga dan pemikiran kontribusinya dari masyarakat pun masih tetap bagus. Jadi tetap masih ada terkait dengan untuk pembangunan desa.”(Wawancara 18 September 2021)

Kendala dan tantangan dalam pengelolaan keuangan desa

Dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung dihubungkan dengan *social capital* ditemukan adanya kendala dan tantangan yang dialami .Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum, sebagai berikut:

“Kendala dan tantangannya ditemukan ya pasti ada kecil-kecil pasti ada karena jiwanya orang kan beda-beda. Ada yang jiwa gotong royongnya cepat dia langsung datang,langsung bantu. Ada yang nggak seperti itu tapi ya manusiawi.”

(Wawancara 15 September 2021)

Solusi untuk menjawab tantangan dan kendala yang ada

Dengan adanya

kendala tersebut, tentunya Pemerintah Desa Tanjung juga perlu untuk menyiapkan adanya solusi yang tepat untuk mengatasi segala permasalahan ataupun tantangan yang ada. Salah satu solusinya adalah seperti yang diutarakan oleh Kasi Pelayanan, sebagai berikut :

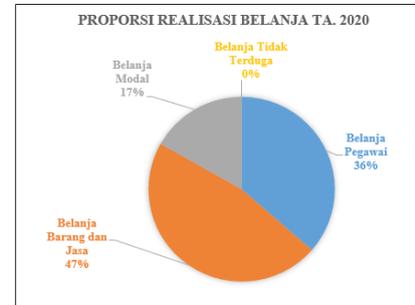
“Kita selalu bermusyawarah dengan bapak-bapak RT dan warga setempat paling nggak tokoh masyarakat.” (Wawancara 15 September 2021).

Harapan kedepan untuk Desa Tanjung.

Aparatur Desa Tanjung tentunya juga mempunyai harapan ataupun cita-cita kedepannya agar supaya Desa Tanjung semakin maju dan semakin berkembang kedepannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Tanjung, sebagai berikut :

“Semoga dengan pengelolaan desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik tercipta desa yang maju dari segi pembangunan baik fisik maupun nonfisik dan semoga dari segi pembangunan juga bisa lebih dibandingkan desa-desa sebelah, kalau bisa justru cita-cita bisa secara pengelolaan keuangan bisa dicontoh oleh desa yang lain dan semoga tercapainya masyarakat Tanjung yang sejahtera, terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,aman. tentram, loh jinawi intinya semacam itu”. (Wawancara 18 September 2021).

Analisis Laporan Keuangan Realisasi APBDesa Tahun 2020



Proporsi Pendapatan

Pada laporan realisasi APBDes Desa Tanjung tahun 2020, proporsi pendapatan terbesar yang diperoleh Desa Tanjung yaitu sebesar 71% berasal dari Pendapatan Transfer, 21% berasal dari Pendapatan Asli Desa dan terkecil sebesar 0% berasal dari Pendapatan lain-lain. Dibawah ini merupakan diagram pie proporsi pendapatan tahun 2020 dapat dilihat dalam gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Proporsi Pendapatan

Proporsi Belanja

Dalam laporan realisasi APBDes Desa Tanjung tahun 2020, proporsi penggunaan anggaran belanja terbesar yaitu sebesar 47% digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, 36% digunakan Belanja Pegawai, 17% Belanja Modal dan yang terkecil 0% digunakan untuk Belanja Tidak Terduga. Adapun diagram proporsi belanja terdapat dalam gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2 Proporsi Belanja

Proporsi Belanja Bidang

Proporsi Belanja Bidang didalam laporan realisasi APBDes Desa Tanjung tahun 2020, penggunaan Belanja Bidang terbesar sebesar 46% digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 41% digunakan untuk Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 10% digunakan untuk Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, kemudian sebesar 3% digunakan untuk Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan terkecil sebesar 0% digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.



Adapun diagram proporsi belanja terdapat dalam gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3 Proporsi Belanja Bidang

Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian 2020

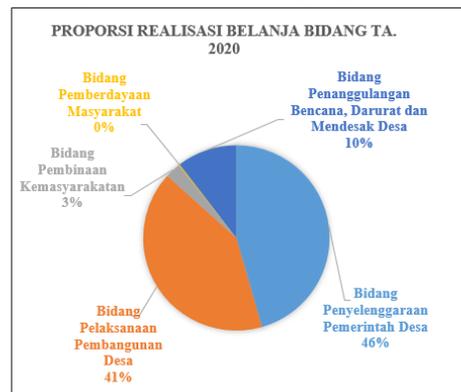
PAD	Rp 354.400.000
Bantuan Pemerintah	Rp 1.301.039.316
Presentase	27,24%

Dari perhitungan rasio kemandirian Desa Tanjung pada tahun 2020 sebesar 27,24 %. Hal tersebut berarti Rasio Kemandiriannya rendah dan belum bisa dikatakan desa mandiri.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Aparatur Pemerintahan Desa Tanjung secara umum sudah paham dengan pengelolaan keuangan maupun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Tanjung sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan. Akan tetapi dua Kepala dusun belum sepenuhnya paham dengan pengelolaan keuangan.
- (2) *Social Capital* (Modal Sosial) di Desa Tanjung hingga saat ini terindikasi masih terdapat di Desa Tanjung akan tetapi



penurunan yang signifikan pasca turunnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Jika sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat ikut serta bergotong-royong secara sukarela, sedangkan sekarang masyarakat lebih mengandalkan tenaga tukang atau masyarakat yang ikut serta mengharapkan imbalan dari yang APBDesa khususnya dana desa.

- (3) Berkurangnya keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong karena suatu

dan lain hal dan masih banyaknya warga yang beranggapan bahwa semuanya sudah ditanggung oleh dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan dari bagi pemerintah desa.

- (4) Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan realisasi APBDes Tahun 2020 Desa Tanjung dapat diketahui bahwa proporsi Pendapatan terbesar yaitu diperoleh dari Pendapatan Transfer sebesar 71%, dan terkecil sebesar 0% berasal dari Pendapatan lain-lain.
- (5) Berdasarkan proporsi Belanja penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 47% dan terkecil sebesar 0% untuk Belanja Tidak Terduga. Selain itu dalam proporsi Belanja Bidang terbesar yaitu sebesar 46% digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan terkecil sebesar 0% digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian, Desa Tanjung dapat dikatakan kemandiriannya masih rendah yaitu sebesar 27,24% hal tersebut dapat dikatakan bahwa masih bergantung dengan bantuan pemerintah pusat maupun daerah.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini, khususnya Pemdes Tanjung dalam mendapatkan data dan sumber penelitian dan civitas program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta atas bimbingan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Sidoarjo: Kencana.
- Dewi Utari, A. P. (2014). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Khominich, I. P., Rybyantseva, M. S., Borodacheva, L. V., Dik, E. V., & Afanasev, E. V. (2016). Financial management as a system of relations of the enterprise for highly efficient management of its finances. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(Special Issue (S8)), 96–101.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mirayani, N. P. (2014). Peranan Modal Sosial Dalam Pengelolaan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) TRI MANDALA TIRTA. *CITIZEN CHARTER*.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ramadhani, D. A., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol 17(No 1), Hal 1-12.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.